

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai potensi kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara. Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran strategis dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan pendekatan Three Lines Model.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan auditor Inspektorat, kepala desa, dan perangkat desa, serta analisis dokumen terkait. Teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis sebagai auditor intern pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Namun, perannya bukan sebagai bagian dari internal pemerintahan desa, melainkan sebagai entitas pengawas eksternal yang memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam konteks otonomi daerah, Inspektorat berfungsi sebagai pengawas administratif dan fasilitator kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Meskipun Three Lines Model menempatkan audit internal pada lini ketiga, dalam pengelolaan keuangan desa, Inspektorat tidak dapat sepenuhnya dikategorikan dalam lini tersebut karena pengawasan utama berada pada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, diperlukan model pengendalian intern yang lebih sesuai dengan struktur pengawasan desa.

Untuk mencegah kecurangan, Inspektorat telah mengembangkan inovasi pengawasan seperti Auditor Pendamping, aplikasi Jadi Kades, SAPU DESA, Monitoring Center of Development (MCD), serta pendekatan budaya. Inovasi ini memperkuat pengawasan preventif, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan sebelum terjadi penyimpangan yang lebih besar.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, pencegahan kecurangan, pengelolaan keuangan desa, Three Lines Model, audit internal.

Abstract

Transparent and accountable village financial management is one of the key indicators of successful village governance. However, in practice, various potential fraud risks that may harm state finances still exist. As the government's internal auditor, the Regional Inspectorate plays a strategic role in fraud prevention. This study aims to analyze the role of the Regional Inspectorate of Boyolali Regency in preventing fraud in village financial management using the Three Lines Model approach.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with Inspectorate auditors, village heads, and village officials, as well as

document analysis. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the Regional Inspectorate of Boyolali Regency plays a strategic role as the internal auditor of the local government in overseeing village financial management. However, its position is not part of the village government's internal structure but rather an external supervisory entity that ensures accountability and transparency in village financial management. Within the framework of regional autonomy, the Inspectorate functions as an administrative supervisor and facilitator of compliance with financial regulations. Although the Three Lines Model places internal audit in the third line, the Regional Inspectorate cannot be fully categorized in this position concerning village financial management, as primary oversight lies with the community and the Village Consultative Body (BPD). Therefore, a more suitable internal control model is needed that aligns with the village's supervisory structure.

To prevent fraud, the Inspectorate has developed various supervisory innovations, such as Auditor Pendamping (Auditor Mentoring Program), the Jadi Kades application, SAPU DESA, the Monitoring Center of Development (MCD), and a cultural approach. These innovations strengthen preventive supervision, minimizing potential fraud before more significant irregularities occur.

Keywords: Regional Inspectorate, fraud prevention, village financial management, Three Lines Model, internal audit.